

Tanggung Jawab Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Mengakomodasi Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Rafli Jassika Aranda¹, Nurhilmiyah²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

e-mail: raflijassika@gmail.com¹, nurhilmiyah@umsu.ac.id²

Abstrak

Prevalensi putus sekolah pada anak pekerja migran Indonesia di Malaysia mencuat sebagai permasalahan mendesak. Studi ini bertujuan mengevaluasi peran Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam memenuhi hak atas pendidikan komunitas rentan tersebut. Penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan kajian dokumen untuk memperoleh pemahaman mendalam. Hasil analisis mengindikasikan telah dilaksanakan sejumlah program pendukung akses pendidikan meskipun belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, direkomendasikan perluasan kerja sama pendirian sekolah eksklusif, penyediaan beasiswa akademik, serta peningkatan diplomasi bilateral guna meniadakan kebijakan diskriminatif yang berlaku. Dengan adanya komitmen kolaboratif multidimensi, diharapkan terwujudnya akses pendidikan inklusif bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai investasi menuju masa depan yang lebih cerah.

Kata Kunci: : *Hak Pendidikan, Pekerja Migran Indonesia, Diplomasi Bilateral, Akses Inklusif*

Abstract

The prevalence of school dropout among children of Indonesian migrant workers in Malaysia has emerged as a pressing issue. This study aims to evaluate the role of the Indonesian Embassy in fulfilling the right to education of this vulnerable community. Qualitative research was conducted through in-depth interviews and document review to gain in-depth understanding. The results of the analysis indicate that a number of programs supporting access to education have been implemented, although not yet fully effective. Therefore, it is recommended to expand cooperation in establishing exclusive schools, providing academic scholarships, and increasing bilateral diplomacy to eliminate discriminatory policies. With a multidimensional collaborative commitment, it is hoped that access to inclusive education for children of Indonesian migrant workers in Malaysia will be realized as an investment towards a brighter future.

Keywords: *Right To Education, Indonesian Migrant Workers, Bilateral Diplomacy, Inclusive Access*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan penyebarannya yang tidak merata memiliki konsekuensi negatif terhadap manfaat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di berbagai negara. Kesenjangan antara tingginya angka kelahiran dan kematian telah menimbulkan masalah kepadatan penduduk di seluruh wilayah Indonesia, menjadi permasalahan jangka panjang. Situasi ini mengakibatkan peningkatan signifikan jumlah tenaga kerja di dalam negeri, sementara lapangan pekerjaan terbatas dan tidak memadai, meningkatkan tingkat pengangguran. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2018, jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,00 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 5,34%. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Dampak negatif dari tingginya tingkat pengangguran di Indonesia termanifestasi dalam migrasi besar-besaran tenaga kerja ke negara lain, terutama Malaysia. Pada tahun 2015, sebanyak 332.335 Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke luar negeri, dan angka tersebut turun menjadi 329.632 orang pada tahun 2016, dengan Malaysia menjadi destinasi utama yang menerima 97.390 orang PMI. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi PMI, dan berbagai instrumen dan regulasi telah diterapkan sebagai upaya perlindungan, sejalan dengan norma internasional. (Sukawarsini Djelantik, 2019)

Malaysia telah menjadi tujuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak penerapan New Economic Policy (NEP) pada periode 1971-1990. NEP di Malaysia secara agresif mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor industri dan ekspor, yang menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi, pabrik, dan pertanian. Tingkat pengangguran di Indonesia menjadi pendorong utama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia. Oleh karena itu, ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan tingkat pengangguran di Indonesia memiliki dampak yang signifikan pada migrasi tenaga kerja ke negara tetangga, terutama Malaysia, dan menuntut perlindungan yang lebih efektif dari pemerintah terhadap PMI. (Andita, 2016)

Salah satu dampak negatif dari jumlah yang besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia adalah peningkatan jumlah anak yang lahir dari mereka. Adanya banyak anak PMI dianggap sebagai dampak yang tidak diinginkan, mengingat peraturan keimigrasian Malaysia yang secara tegas melarang tenaga kerja non-profesional seperti pembantu rumah tangga, buruh konstruksi, pekerja pabrik, dan pekerja perkebunan membawa serta atau menikahi anggota keluarganya di Malaysia. Walaupun demikian, kenyataannya, banyak pekerja non-profesional tersebut menikah, membawa serta keluarga, bahkan melahirkan anak di Malaysia, melanggar aturan yang mengharuskan mereka bekerja tanpa keluarga selama kontrak kerja yang umumnya berlangsung lebih dari 5 tahun. (Chandrawaty, 2020).

Ketentuan perekrutan pekerja asing di Malaysia juga mengatur batasan usia antara 18 hingga 45 tahun, usia produktif yang umumnya mencakup kebutuhan untuk berkeluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak PMI yang membawa anak dan istri tanpa izin tinggal yang sah. Beberapa bahkan melakukan pernikahan, baik dengan sesama Warga Negara Indonesia (WNI) maupun dengan Warga Negara Asing (WNA) lainnya, tanpa prosedur resmi

untuk menjaga keberlakuan visa mereka. Kompleksitas permasalahan ini melibatkan hak dan kewajiban sebagai pekerja, sekaligus hak dan kewajiban sebagai WNI.

Akibatnya, anak-anak PMI di Malaysia menjadi korban, karena keberadaan mereka tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki dokumen resmi di Malaysia. Situasi ini menciptakan masalah baru, terutama di wilayah Sabah dengan sekitar 53.000 anak, Sarawak dengan 3.000 anak, dan Johor Bahru serta wilayah Semenanjung dengan 2.000 anak, yang memerlukan akses dan layanan pendidikan dasar. Problematika anak-anak PMI menjadi agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui jalur diplomasi.

Anak-anak yang berasal dari pekerja migran Indonesia di Malaysia masih menghadapi tantangan serius dalam akses pendidikan mereka. Banyak di antara mereka terpaksa harus menghentikan sekolah atau bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah sama sekali. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kesulitan ekonomi, minimnya dukungan, dan kurangnya fasilitas pendidikan yang bersifat ramah anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari pekerja migran Indonesia. KBRI baru memberikan layanan administratif dasar seperti membantu dengan urusan dokumen kependudukan dan hukum, sementara upaya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak PMI masih sangat terbatas.

Padahal, Konvensi PBB tentang Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini, termasuk Indonesia dan Malaysia, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi. Sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri, KBRI di Kuala Lumpur seharusnya memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab dan upaya KBRI Kuala Lumpur dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Fokus penelitian ini akan mencakup evaluasi terhadap kebijakan, program, dan layanan pendidikan yang telah disediakan oleh KBRI, serta identifikasi tantangan dan hambatan yang masih dihadapi dalam konteks pemenuhan hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk dapat menginvestigasi secara mendalam bagaimana KBRI Kuala Lumpur memenuhi tanggung jawabnya terkait pemenuhan hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. (Maksum, 2008).

Penentuan subyek penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*. Subyek utamanya adalah pejabat KBRI Kuala Lumpur yang menangani isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pendidikan. Selain itu, juga melibatkan perwakilan dari instansi terkait dengan pendataan maupun peran urusan pekerja migran dan pendidikan di bawah KBRI. Adapun informan lain adalah anak pekerja migran yang putus sekolah di Malaysia dan orang tua mereka, dengan total sekitar 30-40 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: (1) wawancara mendalam; (2) diskusi kelompok terfokus; (3) studi data sekunder berupa dokumen kebijakan dan program KBRI; serta (4) observasi lapangan terbatas terhadap kondisi fasilitas dan akses pendidikan anak PMI di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Wawancara dan diskusi difokuskan pada persepsi dan pengalaman partisipan terkait peran dan tanggung jawab KBRI terkait isu pendidikan anak PMI di wilayah kerja KJRI Kuala Lumpur.

Lokasi penelitian adalah Kantor KBRI Kuala Lumpur dan sekitarnya, dengan durasi pengambilan data selama kurang lebih 3 bulan pada tahun 2022. Analisis data penelitian menggunakan pendekatan induktif sesuai prosedur analisis isi/konten untuk data kualitatif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks permasalahan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, penelitian ini membuka tabir terhadap situasi yang mengkhawatirkan. Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa jumlah anak-anak PMI yang menghentikan sekolah di Malaysia mencapai angka ribuan, dengan pembagian per tingkatan pendidikan. Terdapat sekitar 1.200 anak di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 800 anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan 350 anak di tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA). Identifikasi faktor-faktor penyebab putus sekolah juga dapat dilacak, dengan sekitar 73% disebabkan oleh kesulitan ekonomi dalam membayar biaya sekolah, 18% karena mengalami diskriminasi di lingkungan sekolah, dan 9% dikarenakan kendala administrasi dan dokumen kependudukan.

Upaya Konjen Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk memenuhi hak pendidikan anak PMI tercermin dalam sejumlah kebijakan dan program. Diantaranya, KBRI membuka kelas belajar informal di 8 lokasi yang diikuti oleh 102 anak PMI, memberikan bantuan biaya sekolah kepada 210 anak PMI selama periode 2021-2022, dan melakukan pendampingan ke sekolah untuk 270 anak PMI yang mengalami masalah administrasi. Namun, sejumlah hambatan dan tantangan terlihat menghambat efektivitas upaya KBRI dalam menjalankan program tersebut. Dana yang terbatas dan tidak berkelanjutan menjadi salah satu hambatan utama.(Viviansari, 2019). Meskipun telah menginisiasi program bantuan biaya sekolah dan kelas belajar informal, keterbatasan dana dapat menghambat perluasan program dan mencakup lebih banyak anak PMI yang membutuhkan bantuan serupa. Selain itu, sulitnya berkoordinasi dengan instansi terkait di Malaysia menjadi tantangan tambahan. Koordinasi yang efektif dengan pihak Malaysia adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan program dan meminimalisir hambatan administratif.

Kendala lainnya adalah jumlah staf KBRI yang terbatas dan wilayah kerja yang luas. Dalam menghadapi permasalahan yang kompleks ini, perlu adanya sumber daya manusia yang memadai dan tersebar di seluruh wilayah kerja. Selain itu, harapan informan juga mencuatkan aspirasi untuk perluasan program beasiswa dan bantuan biaya sekolah. Dengan dana yang terbatas, tantangan ini menjadi semakin kompleks, memerlukan strategi pembiayaan yang kreatif dan kolaboratif.

Dalam mengatasi hambatan ini, harapan informan juga terkait dengan peningkatan kerja sama diplomatik antara Indonesia dan Malaysia terkait kebijakan pendidikan. Upaya bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Malaysia adalah langkah yang diharapkan dapat menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi anak PMI. Kerja sama diplomatik ini melibatkan dialog antara kedua negara untuk menyinkronkan kebijakan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan anak-anak pekerja migran.(Cahyaningrum, 2021)

Selain itu, harapan informan juga menyoroti kebutuhan akan lebih banyak sekolah Indonesia di wilayah dengan banyak PMI. Pembentukan lebih banyak sekolah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi anak-anak PMI dan mengurangi hambatan birokratis yang mungkin muncul. Meskipun ini merupakan harapan yang baik, implementasinya akan membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah Indonesia dan kerjasama dengan pihak berwenang Malaysia.

Dalam konteks pendidikan anak PMI di Malaysia, penting untuk diingat bahwa anak-anak ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan layak seperti anak-anak lainnya. Penelitian ini menggarisbawahi tantangan nyata yang dihadapi oleh KBRI dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anak PMI. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara negara-negara terlibat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam mendukung hak pendidikan anak-anak PMI di Malaysia.

Tindakan yang Dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dalam Pemenuhan Pendidikan Anak Pekerja Migran

Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dalam memenuhi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Meskipun beberapa tindakan telah dilakukan, terdapat ruang untuk peningkatan optimalitas dan efektivitas dalam menangani masalah kompleks ini. Pertama, KBRI telah menginisiasi program kelas belajar bagi anak-anak PMI di berbagai lokasi di Malaysia. Kolaborasi dengan komunitas diaspora Indonesia menjadi kunci dalam menyelenggarakan program ini. Program tersebut diarahkan untuk mengatasi kasus putus sekolah dengan memberikan akses belajar informal, sambil menunggu bantuan biaya sekolah resmi. Meskipun langkah ini positif, perlu diperhatikan bahwa kelas komunitas memiliki keterbatasan dalam kapasitasnya dan mungkin tidak dapat menjangkau semua anak PMI yang membutuhkan bantuan.

Kedua, KBRI aktif melakukan pendataan dan pemetaan kondisi pendidikan anak PMI di Malaysia. Langkah ini penting untuk merancang program intervensi pendidikan yang tepat sasaran. Menyusun solusi berdasarkan data yang akurat adalah langkah cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan risiko. KBRI juga telah memfasilitasi bantuan biaya sekolah melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan Indonesia di Malaysia. Meskipun CSR dapat memberikan kontribusi positif, hal ini tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya sumber dana yang berkelanjutan.(Muhammad, 2021)

Ketiga, untuk mengatasi kendala administrasi yang menjadi hambatan utama bagi anak PMI dalam mengakses pendidikan formal, KBRI melakukan pendampingan langsung

ke sekolah. Hal ini termasuk membantu dalam mengurus berbagai dokumen administrasi yang diperlukan. Kerja sama dengan pemerintah Malaysia juga dilakukan untuk memperlancar proses administratif. Pemberian Mobile ID kepada PMI adalah langkah yang cerdas untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki identitas lengkap yang diperlukan untuk masuk ke sekolah.(Saleh, 2020)

Namun, penelitian juga mengungkapkan bahwa upaya-upaya tersebut masih terbatas dalam cakupan dan pengaruhnya. Kelas komunitas, sebagai contoh, hanya mampu menampung belajar informal dalam jumlah kecil. Bantuan biaya sekolah juga terbatas dan belum mencukupi secara berkelanjutan. Sementara itu, kendala administrasi dan diskriminasi yang dialami anak PMI di sekolah Malaysia seringkali tidak teratasi sepenuhnya.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya KBRI, perlu adanya terobosan kebijakan dan program lanjutan dengan cakupan yang lebih luas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah perluasan kerja sama dalam pendirian sekolah Indonesia di Malaysia. Dengan adanya sekolah Indonesia, anak-anak PMI dapat memperoleh pendidikan formal tanpa harus menghadapi hambatan administrasi yang kompleks. Penting pula untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak PMI berprestasi. Hal ini tidak hanya memberikan insentif untuk meraih prestasi akademis, tetapi juga memberikan harapan kepada anak-anak PMI bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik.(Wahyudi, 2015)

Selain itu, penguatan diplomasi dan advokasi Indonesia ke Malaysia diperlukan agar kebijakan dan praktik diskriminatif dapat dihapuskan. Dukungan tinggi dari pemerintah Indonesia dan kerja sama yang erat dengan pihak berwenang Malaysia akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan diskriminasi yang dihadapi anak-anak PMI di sekolah Malaysia. Dengan komitmen tinggi dan kerja nyata lintas sektoral, diharapkan akses pendidikan yang inklusif bagi anak PMI di Malaysia dapat segera terwujud. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan tidak boleh ada diskriminasi yang menghalangi mereka untuk mengaksesnya. KBRI, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan inklusif bagi anak-anak PMI di Malaysia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia berkolaborasi dengan pihak terkait seperti non-pemerintahan, untuk penyelenggaraan pendidikan anak Pekerja Migran Indonesia

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur senantiasa berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan akses pendidikan bagi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain institusi pemerintah baik di Indonesia maupun Malaysia, KBRI juga menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi non-pemerintah.

Menurut Rusli, Attache Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur, pihaknya telah lama membangun kemitraan dengan yayasan dan komunitas diaspora Indonesia di Malaysia dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak PMI. Bentuknya antara lain pembukaan kelas belajar informal dan non-formal bagi ratusan anak PMI yang putus sekolah di Malaysia. Kolaborasi ini penting untuk menjangkau daerah dengan jumlah anak PMI yang cukup besar namun minim fasilitas pendidikan memadai.

Selain itu, menurut Salma, Koordinator Komunitas peduli Pendidikan Indonesia Malaysia (KPPIM), organisasi non-pemerintah seperti mereka kerap menjadi mitra KBRI

dalam melakukan pendataan, survei dan pemetaan untuk memperoleh data by name by address mengenai kondisi pendidikan anak PMI. Data lengkap ini penting untuk penyusunan kebijakan dan intervensi pendidikan yang tepat sasaran oleh KBRI dan pemerintah daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, menurut Aprilia, staf LSM Suara Perempuan Migran, organisasi masyarakat sipil kerap menjadi jembatan penghubung antara PMI di akar rumput dengan berbagai skema bantuan pendidikan dari KBRI dan korporasi Indonesia di Malaysia. Collaborative program yang diinisiasi LSM bersama KBRI antara lain bantuan biaya sekolah, beasiswa dan pelatihan keterampilan. Ini penting agar intervensi pendidikan bisa merata ke pelosok.

Meski demikian, menurut staf KBRI yang enggan disebutkan namanya, tantangan kolaborasi dengan non-pemerintah kerap muncul dalam hal pendanaan dan koordinasi program yang berkelanjutan. LSM dan komunitas diaspora kerap bergantung pada donasi dan relawan yang terbatas. Sementara, terkadang program pendidikan yang dijalankan belum maksimal terintegrasi dengan intervensi serupa dari KBRI.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur menyadari pentingnya peran organisasi masyarakat dalam menjangkau anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang membutuhkan akses pendidikan. Salah satu organisasi non-pemerintah yang menjalin kerja sama erat dengan KBRI adalah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia. PCIM merupakan organisasi sayap Muhammadiyah yang bergerak di ranah amal dan sosial kemasyarakatan di Malaysia. Dalam upaya memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak PMI, PCIM telah membentuk "sanggar bimbingan" atau pusat kegiatan belajar non-formal di 3 wilayah berbeda di Kuala Lumpur. Sanggar pertama berada di Kampung Bandan, yang kedua di Kampung Baru, dan yang ketiga di Intan Baiduri, Selangor. KBRI berperan memfasilitasi penyusunan kurikulum dan acuan pembelajaran di sanggar-sanggar bimbingan ini. (Lailam,dkk,2020)

Menurut Ustadz Rizal, Ketua PCIM Wilayah Selangor, keberadaan sanggar bimbingan sangat membantu mengatasi kendala anak PMI yang putus sekolah atau sama sekali belum mendapat pendidikan akibat ketiadaan dokumen kependudukan dan administrasi sekolah formal. "Banyak anak PMI yang awalnya bahkan belum kenal aksara dan berhitung. Berkat sanggar ini mereka bisa belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan para relawan pengajar dari komunitas kita," ungkapnya.

Kolaborasi KBRI dengan PCIM dinilai efektif karena PCIM memiliki jaringan komunitas kuat di tingkat akar rumput. "Kami sangat menghargai kerja sama dengan PCIM karena mereka memiliki pengaruh besar di masyarakat PMI Malaysia. Sebagai mitra, PCIM mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dan komunitas PMI yang kami sulit jangkau," ujar Ali Sholeh, Asisten Konsul Konjenri Indonesia di Kuala Lumpur.

Meski begitu, tantangan masih ada dalam kolaborasi ini. Salah satunya adalah masih terbatasnya cakupan wilayah yang dijangkau sanggar bimbingan PCIM. Seperti di Desa Klang Lama, masih banyak anak PMI yang belum bisa membaca dan menulis sama sekali. Kondisi seperti ini menuntut KBRI untuk terus memperluas kerja sama serupa dengan organisasi non-pemerintah lain di wilayah tersebut.

Namun secara umum, Sholeh menyatakan apresiasi atas peran positif PCIM dalam membantu anak-anak PMI memperoleh pendidikan dasar. "Sinergi PCIM dan KBRI telah membuka peluang pendidikan yang selama ini tertutup bagi anak-anak PMI. Melalui kolaborasi ini, setidaknya ada upaya memutus rantai kebodohan bagi generasi anak PMI di Malaysia," pungkasnya.

Ke depan, KBRI berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah di Malaysia. Selain PCIM, beberapa LSM peduli pendidikan dan diaspora Indonesia juga potensial menjadi mitra kerja KBRI. Sinergi ini penting untuk memperluas cakupan dan mutu layanan pendidikan anak PMI di seluruh wilayah Malaysia.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi kebijakan dan pendanaan program antara pemerintah pusat, daerah, KBRI serta non-pemerintah. Dengan demikian, kolaborasi yang sudah terbangun ini dapat semakin diperkuat dan berdampak luas bagi peningkatan akses layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi para PMI di Malaysia beserta anak-anak mereka.

SIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KBRI Kuala Lumpur telah mengambil beberapa langkah dalam memenuhi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Program kelas belajar, pendataan kondisi pendidikan, dan bantuan biaya sekolah merupakan inisiatif positif yang mencerminkan komitmen KBRI. Meskipun demikian, terdapat tantangan, termasuk keterbatasan dana, koordinasi dengan pihak Malaysia, dan hambatan administrasi. Dalam menanggapi kompleksitas permasalahan, solusi seperti perluasan kerja sama pendirian sekolah Indonesia, penyediaan beasiswa, dan penguatan diplomasi diusulkan untuk meningkatkan efektivitas program. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, seperti diaspora Indonesia, memberikan kontribusi positif, namun tantangan pendanaan dan koordinasi masih perlu diatasi. Penting untuk dicatat bahwa pemenuhan hak pendidikan anak PMI di Malaysia bukan hanya tanggung jawab KBRI, tetapi juga melibatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas negara. Dengan komitmen tinggi dan terobosan kebijakan, diharapkan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak PMI di Malaysia dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Andita, L. R., Damayanti, C., & Suryo, H. (2016). Peran KJRI kota Kinabalu dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak buruh migran Indonesia (TKI) di Sabah. *Transformasi*, 1(30), 150–161.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/1775/1577>
- Atedjadi, R. L. (2015). Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(2), 375–397.
<https://doi.org/10.25123/vej.1693>
- Cahyaningrum, D. (2021). Pelindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia. *Bidang Hukum Info Singkat*, 13(6), 1–6.

- Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan hukum dan tanggung jawab negara terhadap perempuan korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 459–476.
- Lailam, T., Nahdiyati, D., Hamid, H., Andrianti, N., Hidayatullah, A., & Surahmat, I. (2023). Baitul Arqom Internasional Bagi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman Dan Hongaria Dalam Rangka Membangun Kosmopolitanisme Islam Di Eropa. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(3), 2130. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14173>
- MUhammad Azzam Alfarizi, R. N. S. & L. A. K. D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 509–523.
- Saleh, R., Utami, D. W., & Oktafiani, I. (2020). Peran Perhimpunan Pelajar Indonesia (Ppi) Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 199. <https://doi.org/10.14203/jki.v14i2.469>
- Sulistya Handoyo, B., & Triarda, R. (2020). Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia. *Transformasi Global*, 7(2), 201–213. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.2>
- Terhadap, P. H. (2015). *Ana sabhana azmy, Negara buruh migrant perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, h. 2. 170. November, 170–184.
- Viviansari, D. B. (2019). State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia. *Disca Betty Viviansari & Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari*, 10(3), 179–194.
- Widiastuty, L. I. (2019). Pengaruh Kualitas Hidup Perempuan Terhadap Dinamika Angka Harapan Hidup Di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 105–118.